PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MODEL TEBING TINGGI DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

PUBLIC UNDERSTANDING OF EXISTENCE FOREST MANAGEMENT UNIT PRODUCTION (FMUP) MODEL TEBING TINGGI IN KEPULAUAN MERANTI REGENCY PROVINCE RIAU

Muhammad Tabrani[1], Rudianda Sulaeman[2], Evi Sribudiani[2]
(Department of Forestry, Faculty of Agriculture, University of Riau)
Address Bina Widya, Pekanbaru, Riau
(Tabranimhd@gmail.com)

ABSTRACT

Kepulauan Meranti Regency is one of regency in Riau Province, that expansion of Bengkalis Regency. Wide area of Meranti Archipelago Regency is 3.707,84 km^2 with forest region 345.442,42 ha. Impact of the value population growth, illegal logging, unilateral land conversion of secondary swamp forest and forest fire result pressure for forest region and wooded area that remained. Forest Management Unit Production (FMUP) Tebing Tinggi was formed base on central government policies of Kepmenhut No. SK.343/Menhut-II/2011 about Region Consisting of FMUP Model Tebing Tinggi (Unit XXIV) in Kepulauan Meranti Regency Province Riau, with wide area 69.747 ha that consist of protected forest 412 ha and limited forest production 69.335 ha. By that forming of FMUP Model Tebing Tinggi in Kepulauan Meranti Regency, should to know how public understanding of FMUP Model Tebing Tinggi existence. This research is conducted to analyze understanding level and public responses of FMUP Model Tebing Tinggi existence. Data collected by using survey method trought observation stages, interview and literature study. Analyze that used is descriptive analyze. The result of this research show that public understanding level of FMUP Model Tebing Tinggi existence still low. According responses by 78,34% public of Tanjung Darul Takzim Village and 88,34% public of Sungai Tohor Village agree if forest managed by FMUP Model Tebing Tinggi.

Keywords : Understanding, public, forest management unit production

PENDAHULUAN

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, dengan ibu kotanya adalah Selatpanjang. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, dengan dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009.

Dampak dari pertumbuhan penduduk yang membutuhkan ruang lebih luas untuk tempat tinggal dan tempat berusaha mengakibatkan tekanan pada kawasan hutan dan areal berhutan yang tersisa. Terus menipisnya areal hutan berhubungan dengan sebagian mata pencaharian masyarakat setempat yang memanfaatkan hutan mangrove sebagai olahan industri pabrik arang dan maraknya perambahan hutan secara liar maupun konversi lahan secara sepihak pada hutan rawa sekunder. Selain itu kebakaran hutan dan lahan yang marak terjadi beberapa tahun ini mengakibatkan kerusakan dan berkurangnya areal hutan.

1. Mahasiswa Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Riau
2. Staf Pengajar Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Riau

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tebing Tinggi dibentuk berdasarkan kebijakan pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.343/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah KPHP Model Tebing Tinggi (Unit XXIV) di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, dengan luas KPHP Tebing Tinggi adalah 69.747 ha, yang terdiri dari hutan lindung (HL) seluas 412 ha dan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 69.335 ha. Dengan terbentuknya KPHP Model Tebing Tinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu diketahui bagaimana pemahaman masyarakat akan keberadaan kesatuan pengelolaan hutan itu sendiri. Karena pemahaman masyarakat dapat menjadi faktor utama terhadap laju akselerasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan ke depannya.

Masih terbatasnya pengertian akan pemahaman terhadap fungsi dan manfaat KPH bagi pembangunan kehutanan merupakan masalah dan tantangan utama dalam pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. Pada umumnya areal-areal yang dialokasikan untuk pembangunan kesatuan pengelolaan hutan memiliki tingkat konflik lahan yang tinggi dengan masyarakat. Untuk itu perlu diketahui apakah masyarakat sekitar paham atau tidak tentang keberadaan KPHP Model Tebing Tinggi, karena masyarakat merupakan salah satu faktor keberhasilan KPHP Model Tebing Tinggi. Apabila masyarakat tidak memahami, maka bukan tidak mungkin proses pelaksanaan pembangunan KPHP Model Tebing Tinggi akan terganggu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan respon masyarakat terhadap keberadaan KPHP Model Tebing Tinggi.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah KPHP Model Tebing Tinggi, tepatnya di Desa Tanjung Darul Takzim Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur. . Lokasi ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*), dengan pertimbangan kedua desa ini merupakan desa yang termasuk ke dalam wilayah pengembangan KPHP Model Tebing Tinggi. Penelitian ini telah dilaksanakan pada Bulan Mei sampai Juni 2015.

Bahan yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini terdiri dari kuesioner yang digunakan sebagai instrumen pengumpulan data primer di lapangan. Alat yang digunakan adalah peta kerja berupa peta wilayah kawasan KPHP Model Tebing Tinggi, kamera digital, alat perekam suara (*recorder*), alat tulis dan seperangkat komputer untuk mengolah data.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan adalah metode survei. Menurut Moleong (2002) *dalam* Dani (2014), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Jenis data dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan data statistik. Penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data, yaitu primer dan sekunder.

Data primer yang dimaksud terdiri dari: pemahaman dan respon masyarakat terhadap keberadaan KPHP Model Tebing Tinggi yang dilihat dari hasil wawancara menggunakan kuesioner, asal penduduk, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Penentuan responden dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu responden dipilih dengan cermat yang dianggap dapat mewakili seluruh lapisan masyarakat (Bungin, 2003). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui monografi desa meliputi keadaan umum lokasi penelitian, informasi data dari KPHP Model Tebing Tinggi dan studi literatur.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengambilan informasi dengan metode survei dengan cara :

1. Observasi, yaitu pengambilan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti kemudian mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data yang diperlukan.
2. Wawancara, yaitu melakukan wawancara 10% dari masyarakat sebagai responden tiap desa lokasi penelitian dengan menggunakan kuesioner, dengan kriteria responden merupakan masyarakat desa setempat (penduduk asli/pendatang).
3. Studi literatur, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai literatur, landasan teori serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu menguraikan fakta-fakta lapangan secara ilmiah. Menurut Arikunto (1998), penelitian deskriptif yaitu mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu termasuk hubungan, kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Wilayah KPHP Model Tebing Tinggi seluas 69.747 ha tersebar di 3 (tiga) pulau, yaitu Pulau Tebing Tinggi, Pulau Merbau dan Pulau Padang yang secara administratif pemerintahan berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Secara geografis terletak pada 0°41’9,4’’ LU – 1°7’42,6’’ LU dan 102°25’56,1’’ BT - 103°2’34,3’’ BT.

Penutupan lahan di wilayah KPHP Model Tebing Tinggi didominasi oleh hutan rawa sekunder dan tanaman sagu milik masyarakat dan tanaman pokok IUPHHK-HTI yang berada di Areal KPHP Model Tebing Tinggi. Luas hutan rawa sekunder sekitar 41.762,97 ha atau 59,88% dari total luas wilayah KPHP, sedangkan hutan mangrove sekunder seluas 6.950,67 ha atau 9,97% yang terdapat di sisi kiri kanan Selat Rengit dan di sisi beberapa sungai yang mengalir di wilayah KPHP.

Jenis-jenis vegetasi di wilayah KPHP Model Tebing Tinggi merupakan jenis vegetasi hutan hujan tropis basah yang didominasi *Diperocarpaceae*. Jenis tanaman hutan yang banyak ditemukan adalah Suntai (*Palaquium burckii*), Bintangur (*Calopyllum pulcherrimum*), Meranti Rawa (*Shorea* sp.), Geronggang (*Cratoxylum arborescens*), Kempas (*Koompassia malaccensis*), Kelat (*Syzygium* sp.), Ramin (*Gonystylus bancanus*) dan Punak (*Tetramerista glabra*). Selain itu, terdapat tanaman di antaranya jenis Sagu (*Metroxylon* sp.).

Satwa liar yang terdapat di wilayah KPHP Model Tebing Tinggi terdiri dari jenis mamalia antara lain : babi hutan (*Sus barbatus*), rusa (*Cervus unicolor*), kancil (*Tragulus javanicus*), tikus hutan (*Rattus rattus*). Sedangkan untuk satwa liar dari jenis primata dan burung populasinya sangat kurang dan jarang sekali ditemukan. Beberapa jenis burung yang dilindungi misalnya raja udang biru (*Alcedo meninting*), dan yang tidak dilindungi seperti gagak (*Corvus macrorhynchos*), elang ikan (*Ichthyophaga ichtyaetus*), layang (*Hirundo tahitika*), punai bakau (*Treron fulvicollis*) dan lain-lain.

Sesuai pembagian administrasi pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti, wilayah KPHP Model Tebing Tinggi terletak di 5 (lima) kecamatan, yaitu : Kecamatan Merbau, Kecamatan Pulau Merbau, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Kecamatan Tebing Tinggi Timur.

4.2.Karakteristik Responden

Masyarakat adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal di sekitar kawasan KPHP Model Tebing Tinggi. Karakteristik masyarakat sebagai responden dari Desa Tanjung Darul Takzim dan Desa Sungai Tohor meliputi asal penduduk, pendidikan dan pekerjaan yang disajikan pada Tabel 2. Asal

penduduk dan pekerjaan terkait dengan keterampilan responden, karena pada umumnya menggarap lahan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan tingkat pendidikan dan pekerjaan dapat memperlihatkan pemahaman responden terhadap definisi hutan/sumber daya hutan dan kesatuan pengelolaan hutan.

Tabel 2. Karakteristik masyarakat sebagai responden (Desa Tanjung Darul Takzim dan Desa Sungai Tohor)

No.	Karakteristik	Desa Tanjung Darul Takzim (%)	Desa Sungai Tohor (%)
1	Asal Penduduk		
	a. Asli	98,57	79,16
	b. Pendatang	1,43	20,84
2	Pendidikan		
	a. SD	60	70
	b. SMP	12,85	18,34
	c. SMA	18,58	10
	d. S1	8,57	1,66
3	Pekerjaan		
	a. Petani/Pekebun	48,57	30,84
	b. Nelayan	4,20	1,66
	c. Buruh	17,14	10
	d. Wiraswasta	17,14	41,66
	e. Pegawai/Honor	12,95	5,84

Sumber : Data primer (2015)

4.3. Pemahaman Masyarakat Terhadap Hutan dan Sumber Daya Hutan

Hutan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena hutan mempunyai fungsi ekologis, sosial dan ekonomis. Bagi masyarakat desa yang bertempat tinggal di dekat hutan, hutan merupakan bagian dari kehidupannya. Walaupun hutan alam disekitar mereka telah berubah menjadi hutan tanaman yang dikelola oleh pemerintah, pandangan masyarakat sebenarnya tidak berubah. Rakyat tetap menganggap hutan disekitar desanya itu sebagai sumber untuk memperoleh kayu bakar, pakan ternak, kayu bangunan, lapangan kerja, tempat bermain anak-anak dan sebagainya (Simon, 2004).

Pemahaman masyarakat menyangkut bagaimana pengelolaan kekayaan sumber daya hutan yang telah dilakukan, sejarah interaksi dengan hutan dan kondisi sosial budaya masyarakat. Seringkali perbedaan pemahaman memicu permasalahan antara lain gangguan hutan seperti perburuan liar, penebangan liar, pemungutan hasil hutan tanpa izin hingga perambahan lahan. Sehingga kondisi pemahaman masyarakat perlu diketahui agar pengelolaan potensi hutan dapat dilaksanakan dengan kerjasama berbagai pihak yaitu masyarakat, *stakeholder* terkait, pemerintah daerah dan sektor lain yang berpartisipasi penuh.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat menyadari kehidupan mereka dipengaruhi oleh hutan. Seluruh responden Desa Tanjung Darul Takzim beranggapan bahwa hutan merupakan sumber kebutuhan masyarakat yang paling besar, keberlangsungan hidup mereka berasal dari hutan, sebagai sumber air agar terhindar dari kekeringan dan sumber kayu. Seluruh responden Desa Sungai Tohor juga beranggapan tidak jauh berbeda bahwa hutan merupakan pelindung/penyangga lingkungan yang dibutuhkan masyarakat sebagai sumber air dari alam untuk menghidupkan tanaman sagu dan terhindar dari kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh kekeringan tanah gambut.

Terkait dengan mata pencaharian masyarakat tidak terlepas dari pemanfaatan kayu alam, menebang kayu untuk dijual dan membuka lahan hutan untuk dijadikan sebagai areal perkebunan karet dan sagu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara juga terungkap bahwa *illegal logging* telah menghancurkan hutan. Faktor lain penyebab kerusakan hutan adalah kegiatan alih fungsi lahan yang dulunya hutan menjadi areal perkebunan dan HTI serta pembuatan kanal oleh beberapa perusahaan HTI yang mengakibatkan kekeringan pada areal hutan. Keberadaan perusahaan HTI pada beberapa lokasi tertentu memicu konflik antara perusahaan dengan masyarakat berupa penguasaan areal sehingga muncul kekhawatiran yang

menjadi pertimbangan kurang tertanganinya beberapa areal hutan.

Kurangnya pembinaan masyarakat oleh pemerintah daerah dan para *stakeholder* terkait menjadi acuan penting dalam menyelesaikan konflik dan mengurangi kerusakan hutan yang terjadi. Karena masyarakat tidak dapat terlepas dari hutan yang merupakan salah satu kebutuhan hidup. Seiring dengan itu, pemahaman dan keterlibatan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan hutan di masa yang akan datang.

4.4. Tingkat Pemahaman dan Respon Masyarakat Terhadap Keberadaan KPHP Model Tebing Tinggi

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Tebing Tinggi telah lama dibentuk sejak tahun 2011. Dengan tujuan pembentukan KPHP Model Tebing Tinggi adalah tertatanya kawasan hutan produksi dalam unit-unit yang rasional dan menguntungkan serta dapat menjamin tersedianya hasil hutan dan manfaat lainnya bagi pembangunan nasional, pembangunan daerah dan masyarakat sekitar hutan di wilayah KPHP Model Tebing Tinggi secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat dilihat pada Grafik 1.

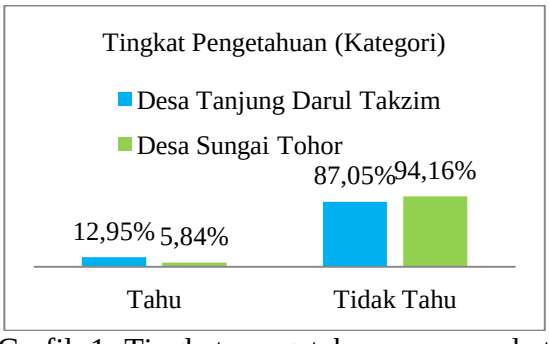

Grafik 1. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan KPHP Model Tebing Tinggi

Grafik 1. menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan KPHP Model Tebing Tinggi rendah. Sebagian besar masyarakat Desa Tanjung Darul Takzim dan Desa Sungai Tohor belum mengetahui adanya KPHP Model Tebing Tinggi secara langsung. Faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dikarenakan sosialisasi tentang KPHP Model Tebing Tinggi kepada masyarakat setempat belum pernah dilakukan. Sedangkan sebagian kecil masyarakat yang merupakan perangkat/karyawan masing-masing kantor desa mengetahui adanya KPH, dengan dilakukannya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) oleh KPHP Model Tebing Tinggi.

Berdasarkan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan KPH dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat juga rendah. Sudijono (2009), mengatakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.

Namun, hal ini tidak menyiratkan bahwa respon masyarakat terhadap keberadaan KPHP Model Tebing Tinggi turut rendah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa respon masyarakat dilihat pada Grafik 2.

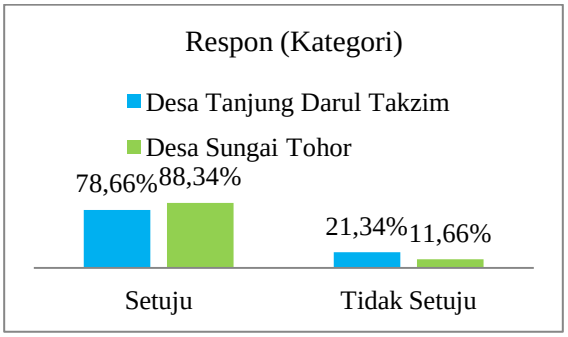

Grafik 2. Respon masyarakat terhadap keberadaan KPHP Model Tebing Tinggi

Grafik 2. menunjukan bahwa respon masyarakat terhadap keberadaan KPHP Model Tebing Tinggi sangat tinggi. Sebagian besar masyarakat Desa Tanjung

Darul Takzim dan Desa Sungai Tohor setuju apabila hutan dikelola oleh KPHP Model Tebing Tinggi. Inisiatif ini muncul karena masyarakat berharap hutan dapat dikelola dengan baik dan mereka dapat diikutsertakan dalam pengelolaan hutan/sumber daya hutan demi tersedianya akses masyarakat terhadap hutan, mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan konflik yang sering terjadi dengan perusahaan bisa ditangani. Sedangkan respon tidak setuju dipengaruhi oleh pekerjaan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan buruh (buruh harian lepas).

Permasalahan utama terdapat pada belum dipahami dan belum sinerginya penetapan Peraturan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang berlaku, terkait dalam perangkat hukum landasan pembentukan KPH yang menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pembangunan KPHP Model Tebing Tinggi saat ini. Hal tersebut memicu konflik tumpang tindih kewenangan antara Dinas Kehutanan dan Pekebunan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan KPHP Model Tebing Tinggi.

Disadari bahwa salah satu penghambat laju perkembangan KPH adalah regulasi yang tidak mendukung yang berasal dari Pemerintah Pusat. Pembangunan KPH berjalan melalui proses belajar antar *stakeholders*, yang harus difasilitasi melalui Peraturan Perundang-undangan sehingga KPH tidak takut berbuat salah (Soetrisno, 2014).

KPH awalnya diarahkan menjadi bentuk nyata desentralisasi pengelolaan hutan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pembentukan KPH diharapkan dapat dijadikan sebagai momentum untuk memperbaiki permasalahan tata kelola kehutanan (Hernowo, 2011). Seiring dengan itu, perbedaan kesiapan masing-masing daerah dan cukup lemahnya dukungan berbagai pihak akibat keterbatasan pemahaman dan pengetahuan mengenai KPHP Model Tebing Tinggi sangat dimaklumi. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan Kabupaten Kepulauan Meranti yang masih baru dan butuh tatanan pemerintahan yang lebih serius. Hingga sekarang, masyarakat sama sekali tidak mengetahui adanya suatu lembaga yang menangani pengelolaan hutan tingkat tapak yang disebut KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Model Tebing Tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap keberadaan KPHP Model Tebing Tinggi masih rendah, karena sosialisasi tentang KPHP Model Tebing Tinggi belum pernah dilakukan.
2. Respon dari 78,34% masyarakat Desa Tanjung Darul Takzim dan 88,34% masyarakat Desa Sungai Tohor setuju apabila hutan dikelola oleh KPHP Model Tebing Tinggi.

5.2. Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang peran keberadaan KPHP Model Tebing Tinggi terhadap penyelesaian konflik antara pemegang izin (*stakeholder*) dengan masyarakat sekitar kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 1998. **Manajemen Penelitian**. Rieka Cipta. Jakarta.

Bungin, B. 2003. **Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filisofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Dani, R. 2014. **Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Rokan Hilir.** Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Riau, Pekanbaru. (Tidak dipublikasikan)

Hernowo, B. 2011. **Pembangunan KPH Sebagai Prioritas Nasional.**

Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/BAPPENAS. Disampaikan pada : Peluncuran Buku KPH, 2 Desember 2011. Jakarta.

Simon, H. 2004. **Membangun Desa Hutan Kasus Dusun Sambiroto.** Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Soetrisno, 2014. **Optimalisasi Pemanfaatan Wilayah Tertentu dan Operasionalisasi KPHP dan KPHL (Perspektif Manajemen).** Makalah disampaikan pada : Rapat Koordinasi nasional KPH 2014. 13-15 Oktober 2014. Jakarta.

Sudijono, A. 2009. **Pengantar Statistik Pendidikan.** PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.